

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

A, Muri Yusuf. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Kencana: Jakarta

Eko, S. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Suaka Media: Yogyakarta

Maleong, Lexi J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.: Bandung

Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. 2015. Deputi Bidang Pengawasan Keuangan Daerah BPKP: Jakarta

Sudarno Sumarto, Asep Suryahad, dan Alex Arifianto, 2004. *Tata Kelola Pemerintahan Dan Penanggulangan Kemiskinan: Bukti-Bukti Awal Desentralisasi Di Indonesia*. SMERU Research Institute, Jakarta. Maret 2004.

Supriyono, R.A. 2000. *Akuntansi Biaya: Perencanaan dan Pengendalian Biaya serta Pembuatan Keputusan*. Edisi Kedua, Buku Kedua. BPFE, Yogyakarta

### Jurnal

Abadiyah Rifdah. 2013. *Analisis Pengaruh Perencanaan Strategik terhadap Kinerja Organisasi dalam Upaya Menciptakan Keunggulan Bersaing Industri Kecil Menengah Tas dan Koper Kecamatan Tanggulangin Kab. Sidoarjo*. Call for paper 2013; Bidang Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Apriliana, Somborarak. 2014. *Evaluasi Program Alokasi Dana Desa di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara*. eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 2, Nomor 2, 2014: 2704-2715

Chandra, Kusuma, dkk. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6. Hal. 1203-1212

Djoko, S dan Risti, V. 2013. *Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan di Desa Dari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013*. Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015

Lina,N dan Mawar.2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.Jurnal Bisnis dan Manajemen IslamVol. 3, No. 1, Juni 2015

Maisyah,Kholmi.2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*. Ekonomika-Bisnis, Vol. 7 No. 2 Bulan Juli Tahun 2016 Hal 143-152

Muhammmad,Ismail,dkk.2016. *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume XIX No. 2, Agustus 2016

Ningrum,Widhayu,dkk.2013. Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol.6 No.2 Desember 2013

Okta,R. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Studi Kasus Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang*. Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya

Pakpahan, Edi Saputra,dkk. Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). Jurnal Administrasi Publik Vol.2 No.1 Hal 116-121

Suparman,dkk. 2014. *Implementasi Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara*. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN

Siti,M dan Tjahjani. *Evaluasi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas*. Universitas Wijayakusumo Purwokerto

Rustam.2009. Penerapan Fungsi Manajemen pada Rencana Kerja PT. Perkebunan Nusantara III (Persero). Jurnal Riset Ekonomi Vol,3, No.2 (2009)

Thomas.2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung. eJournal Pemerintahan Integratif.eJournal Pemerintah Integratif 2013,1 (1) : 51-

64

## **Undang-Undang dan Peraturan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa (jo. UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyerahan Urusan Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemanauan dan Evaluasi Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

